

## **BAB IV**

### **RESPON BERBAGAI NEGARA KORBAN TERHADAP KEBIJAKAN MUSLIM TRAVEL BAN PADA MASA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP**

Dalam bab ini akan membahas mengenai pengaplikasian teori politik luar negeri dalam kasus yang diangkat dalam penulisan ini. Lalu bab ini juga akan membahas bagaimana respon yang dikeluarkan oleh berbagai negara korban atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Donald Trump pada awal masa kepemimpinannya. Kebijakan yang dikeluarkan pada awal masa kepemimpinan Trump yaitu berupa larangan bagi muslim dari negara Iran, Irak, Suriah, Somalia, Yaman, Sudan, Libya untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

#### **A. Faktor Pembentuk Politik Luar Negeri Suatu Negara**

Politik luar negeri merupakan suatu strategi, tindakan yang direncanakan, yang pada akhirnya dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara yang akan ditunjukkan untuk negara lain.

Politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi, kemampuan militer serta lingkungan internasional negaranya. Politik luar negeri tujuh negara korban juga dipengaruhi oleh faktor diatas, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

##### **1) Kondisi Politik Dalam Negeri**

Politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan yang pertama adalah faktor mengenai keadaan politik dalam negeri

suatu negara tersebut. Begitupula dengan politik luar negeri dari tujuh negara korban Kebijakan Muslim Travel Ban. Masing-masing negara korban memiliki politik luar negeri tersendiri dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump pada masa kepemimpinannya. Hal tersebut dikarenakan masing-masing negara memiliki kondisi politik dalam negeri yang berbeda-beda.

### **1.1 Iran**

Yang pertama akan dibahas adalah kondisi politik dalam negeri Iran. Iran merupakan negara yang menganut sitem Republik. Sistem Republik adalah sistem politik yang banyak dianut di kawasan Timur Tengah salah satunya Iran. Iran merupakan salah satu negara dengan sistem Republik yang menerapkan sistem politik multi partai. Iran memiliki beberapa aliran partai dinegaranya, diantaranya adalah konservatif, konservatis pragmatis, neokonservatif, konservatif tradisional, reformis, reformis modern, reformis tradisional dan reformis pragmatis. Namun Iran tetap menerpakan sistem multi paartai yang bersyariatkan Islam. (Prastyo, 2017)

Dengan menerapkan sistem multi partai dapat dikatakan apabila Iran memiliki berbagai kubu. Dengan beragam kubu yang dimiliki oleh Iran, banyak belah pihak yang mengatakan apabila Iran akan mengalami banyak kesusahan dalam menjalankan sistem politik dinegaranya. (Prastyo, 2017)

Apa yang menjadi prediksi banyak pihak ternyata memang benar dirasakan oleh Iran, Iran memang tidak begitu mudah menjalankan sistem politik dinegaranya

karena terlalu banyak kubu. Ditambah lagi dengan status kepemilikan nuklir di Iran, hal tersebut menjadikan posisi Iran di dunia internasional menjadi lebih sulit. Namun, setelah terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden Iran selanjutnya, seperti memberikan harapan baru bagi rakyat Iran. Hassan Rouhani dikenal sebagai sosok yang memiliki moderat dan hal tersebut diterapkan saat ia menjabat sebagai presiden Iran. (Phoenna, 2016)

Hassan Rouhani lah pemerintah Iran yang sangat berpengaruh dalam perubahan citra Iran dalam bidang nuklir di kancah internasional. Rouhanilah sosok yang mampu meyakinkan dunia atas kepemilikan nuklir Iran semata bertujuan untuk kedamaian. Pada masa kepemimpinan Rouhani juga terlihat banyak perubahan dari Iran sendiri. Yang dulunya Iran merupakan negara yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak sipil, namun pada masa kepemimpinan Rouhani ia mampu merubah dan mengembangkan politik dalam negeri negaranya. Pada masa kepemimpinannya ia memusatkan perhatiannya terhadap pemenuhan hak sipil dinegaranya. Dan pada masa kepemimpinan Rouhani ia berjanji akan memperbaiki perekonomian di negaranya.

## **1.2 Irak**

Yang kedua adalah Irak, Irak merupakan negara yang dikenal sebagai ancaman dunia pada masa kepemimpinan Saddam Hussein. Saddam Hussein dikenal sebagai sosok yang sangat keras dan sering menggunakan kekerasan dalam mengatasi

suatu permasalahan. Masa kepemimpinan Saddam Hussein pun runtuh dan tergulingkan, dimana dalam penggulingan rezim Saddam Hussein Amerika Serikat ikut peran dalam penggulingan tersebut. (Yumitro)

Pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein, suasana perpolitikan di Irak pun terasa berubah. Perubahan suasana pasca masa kepemimpinan Saddam Hussein pun berdampak terhadap pemetaan kekuatan-kekuatan politik Irak. Begitupula sebaliknya, dimana kekuatan-kekuatan politik mempengaruhi suasana perpolitikan di Irak. Pasca berakhirnya masa kepemimpinan Saddam Hussein muncullah kekuatan-kekuatan politik baru yang lebih adaptif, walaupun sesungguhnya kekuatan-kekuatan politik di Irak tetap berafiliasi dengan tiga kelompok utama masyarakat diantaranya Sunni, Syiah dan Kurdi. Proses politik Irak sendiri lebih menguntungkan bagi kelompok Kurdi dan Syiah, dimana Sunni lebih merasa dirugikan. (Yumitro)

Hal tersebut terjadi karena Kurdi sendiri lebih diuntungkan pada bidang politik dan budaya karena pada dasarnya kelompok Kurdi memiliki suara yang lebih dominan dalam pemilu. Lalu Syiah, Syiah lebih diuntungkan karena Syiah sendiri menjadi kelompok yang lebih dominan dalam pemerintahan Irak. Dengan kondisi yang seperti itu dan kelompok Sunni yang merasa dirugikan, tentu saja hal ini memicu konflik terhadap antar 3kelompok ini di Irak. Konflik antara 3kelompok tersebut menjadi awal

konflik di Irak pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein. (Yumitro)

Perubahan suasana perpolitikan di Irak sendiri justru membuat struktur masyarakat terpecah belah, dan membuat institusi negara melemah. Pemerintahan yang dibentuk pasca runtuhnya rezim justru menghasilkan pemerintahan yang tidak legitimate. Dan juga kelompok etnis dan sekte yang tidak terwakili dalam pemerintahan Irak, terus melakukan perlawanan. Hal tersebut membuat indikasi stabilitas keamanan akan lebih sulit diwujudkan di negara ini. (Yumitro)

### **1.3 Suriah**

Lalu Suriah, Suriah merupakan negara dengan bentuk negara Republik. Dimana negara ini terdiri dari 14 provinsi dan dikepal negara Suriah adalah Presiden. Lalu kepala pemerintahan Suriah dikepalai oleh seorang menteri. Menteri ini juga memiliki tugas yaitu mengatur dewan perwakilan rakyat (majelis al-Sha'ab) yang memiliki 250 kursi rakyat. Dengan bentuk negara Republik, banyak orang yang mengartikan apabila Suriah menganut sistem demokratis. Tapi pada nyatanya Suriah jauh dari kata demokratis. Dan Suriah sendiri merupakan negara yang sering mengalami jatuh bangun dibidang perpolitikannya. Hal ini dibuktikan dengan Suriah pernah mengalami dimana negaranya dikuasai oleh kerajaan Ottoman, lalu pernah Suriah juga pernah berada dibawah kekuasaan Prancis, kekuasaan Sunni dan sekarang berada di bawah kekuasaan Syiah. (Rosyada, 2017)

Di bidang politik sendiri, Partai Ba'ath adalah partai yang menguasai dan mengontrol perpolitikan Suriah sejak tahun 1963 sampai saat ini. Partai Ba'ath sendiri merupakan partai yang dikuasai oleh kelompok Alawi, dimana kelompok Alawi ini merupakan kumpulan dari beberapa orang yang menganut Syiah. Presiden Suriah Bashar Al-Assad sendiri merupakan anggota dari kelompok Alwi, dimana ia menganut Syiah. Dengan dikuasainya perpolitikan Suriah oleh partai Ba'ath tentu saja membuat kelompok politik lainnya hanya memiliki pengaruh yang sedikit di Suriah. (Rosyada, 2017)

Awalnya masyarakat Suriah hanya mengikuti alur tersebut, namun semakin kesini para masyarakat terutama dikalangan pemuda mulai meresahkan dampak yang terjadi atas kepemimpinan Bashar Al-Assad. Dimana mereka merasakan apabila pada masa kepemimpinan Bashar Al-Assad, ia terlalu mengekang kebebasan rakyatnya. Mulai sejak itu beberapa demonstrasi pun berdatangan terus menerus dan membuat nama Suriah terangkat pada tahun 2011 akibat adanya perang sipil yang diakibatkan dari adanya krisis politik. Dengan banyaknya demonstrasi, konflik yang terjadi di Suriah akibat dari krisis politiknya tentu saja mengubah arah perpolitikan Suriah yang awalnya tenang menjadi tidak terkontrol. (Rosyada, 2017)

#### **1.4 Sudan**

Keempat Sudan, Sudan merupakan negara yang sempat menjadi negara terbesar

dan salah satu negara yang memiliki jumlah keragaman geografis paling tinggi di Afrika. Namun keadaan tersebut berubah ketika pada Juli 2011 Sudan terpecah menjadi dua antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Dimana pada tahun 2011 Sudan Selatan memilih untuk kemerdekaannya sendiri. (BBC News, 2019)

Pemisahan Sudan Selatan dari Sudan sendiri memicu berbagai masalah antar kedua negara tersebut. Masalah perminyakan dan perbatasan wilayah menjadi masalah yang menegangkan bagi kedua negara tersebut. Sudan juga merupakan negara yang telah lama mengalami berbagai konflik. Mulai dari perang saudara, dimana perang ini telah mengalami dua putaran peperangan antara utara dengan selatan. Perang saudara antar kedua negara tersebut telah menelan korban kurang lebih 1,5 juta orang. Selain perang saudara Sudan juga mengalami konflik berkelanjutan di wilayah barat Darfur. Konflik berkelanjutan di Darfur sendiri telah menewaskan lebih dari 200.000 jiwa. (BBC News, 2019) Konflik Darfur sendiri juga menjadi puncak perpindahan jutaan orang ke tempat lain untuk mengamankan dirinya. Sudan tidak hanya dilanda konflik bersenjata namun negara ini juga mendapatkan sanksi-sanksi internasional dan harus kehilangan keuntungan-keuntungan dari industri minyaknya ketika Sudan Selatan menyatakan kemerdekaannya. (VOA, 2015)

Selain itu keadaan politik di Sudan sempat mengalami kehancuran, dimana saat itu Sudan dipimpin oleh Brigjen Omar Hasan Al Bashir. Pada masa kepemimpinannya

Sudan mengalami krisis kekuasaan, dimana Bashir mengubah konstitusi Sudan dan membubarkan parlemen agar dapat berkuasa untuk jangka panjang. Hal ini dilakukan oleh Bashir diduga karena ia ingin menguasai kekayaan alam Sudan yang diantaranya ada emas, minyak, berlian, uranium dan gas bumi. Selain itu Bashir juga menjadi buronan oleh Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) atas dakwaan kejahatan perang pada tahun 2003. Bashir diduga telah melakukan kejahatan perang dan genosida karena telah mengarahkan militer untuk mendukung milisi-milisi Arab untuk menghentikan pergolakan bersejata di Darfur. (VOA, 2015)

### **1.5 Somalia**

Lalu Somalia, Somalia merupakan negara yang dikatakan oleh PBB sebagai failed state. Selain itu Somalia juga negara dikawasan Afrika yang sering diasosiasikan dengan kejadian kekerasan, perebutan sumber daya alam, sengketa perbatasan, irredentisme, kekacauan, budaya konflik dan kemiskinan. Somalia dianggap sebagai failed state karena negara ini tidak memiliki otoritas pusat yang terakui dan tidak adanya mata uang nasional. Otoritas secara de facto sendiri berada ditangan pemerintahan yang tidak pernah diakui seperti Somaliland, Puntland dan gembong militan kecil yang saling bermusuhan satu sama lain, diman ketiga pemerintahan tersebut memimpin pemerintahan oposisi. (Carolina D. Rainitha Siahaan)

Selain itu informalitas pemerintahan di Somalia sendiri mengalami beberapa



pergantian siklus, mulai dari jantan militer, figur ketokohan, Siad Barre yang diktator dan ketika rezim yang diktator ini tumbang digantikan dengan siklus perebutan kekuatan atau kekuasaan oleh berbagai klan dan aliran politik. Namun semua perubahan siklus di Somalia sendiri tidak merubah apapun di negaranya, justru menjadi mimpi buruk bagi Somalia. Semua yang dilakukan oleh pemerintah seakan tidak sesuai dengan kaedah yang sesuai dengan prosedur negara sesungguhnya. Musuh terbesar Somalia bukan berasal dari luar tapi melainkan dari dalam negaranya sendiri. (Carolina D. Rainitha Siahaan)

Somalia merupakan negara dengan jumlah etintas tertinggi dimana pemerintah tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu Somalia juga negara dengan birokrasi, namun birokrasi ini dipertanyakan akuntabilitasnya, serta pemerintah tidak responsive terhadap kebutuhan rakyatnya. Institusi pemerintahan menjadi ladang korupsi untuk kebutuhan dan keuntungan pribadi. (Carolina D. Rainitha Siahaan)

Selain informalitas dan kekacauan di Somalia tidak hanya terjadi pada level pemerintahan saja, namun juga pada level lainnya seperti masyarakat. Ketika wewenang pada rezim pemerintahan menurun dan terdelegitmasi, pelayanan hak publik juga ikut terabaikan. (Carolina D. Rainitha Siahaan)

## **1.6 Yaman**

Yang ke enam adalah Yaman, Yaman merupakan negara yang tidak stabil

diberbagai bidang. Mulai dari bidang ekonomi, sosial dan perpolitikannya. Yaman juga merupakan negara yang mengalami krisis kekuasaan. Berbagai konflik sering menimpa negara ini. (Maulana, 2015) Krisis kekuasaan dinegara ini dapat dilihat pada masa kepemimpinan Ali Abdullah Saleh, dimana ia telah menjabat sebagai pemimpin Yaman selama 32 tahun. Yang lebih parahnya lagi pada masa kepemimpinannya, Ali Abdullah Saleh banyak melakukan tindakan KKN, tidak menerima suara rakyat, tidak adanya transparansi dari pihak pemerintah, dan tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. (Muharjono, 2013)

Dari situlah revolusi terjadi di negara Yaman, dengan ketidakpuasaan rakyat atas kepemimpinan Ali Abdullah Saleh mereka melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan rezim Ali Abdullah Saleh pada tahun 2011. Selain itu sejak tahun 2004 sudah terlihat ketidak harmonisan antar pemerintah dengan rakyat. Hal tersebut terjadi karena pemerintah memerintahkan para tentara untuk menembaki rakyat sipil yang tidak bersalah saat terjadinya perang antara kelompok pembrontak Al-Hutsii dengan tentara loyalis pemerintah. Konflik tersebut terus menerus terjadi hingga saat ini. Mulai dari demonstrasi dan berujung dengan perang akibat dari kepemimpinan Ali Abdullah Saleh, lalu konflik mengenai antar kelompok pemberontak dan perang akibat dari bantuan yang diberikan oleh Arab Saudi atau dikatakan Arab Spring. (Muharjono, 2013)

Konflik yang terjadi dinegara ini dikarenakan tidak adanya kestabilan dibidang

politik, baik dari sistem perpolitikan atau yang lainnya. Selain itu dibidang ekonomi, sosial dan militer negara ini pun juga mengalami tidak kestabilan, sehingga membuat negara ini mengalami konflik yang berkelanjutan. (Muharjono, 2013)

### **1.7 Libya**

Lalu Libya, Libya merupakan salah satu negara yang terkena imbas badai dari Arab Spring. Banyak perlawanan dan demonstrasi yang bermunculan dari rakyat yang diakibatkan tidak adanya regenerasi kepemimpinan lebih dari 4 dekade dan sistem politik yang terlalu otoriter. Pada masa kepemimpinan Gaddafi, sistem politik Libya dibentuk untuk mempertahankan suatu kekuasaan. Partai politik, media masa dan gerakan oposisi diberenggus keberadaannya oleh Gaddafi. Para aktivis dan tokoh oposisi yang ditangkap dan dibunuh pada masa kepemimpinan Gaddafi. (Ghafur, 2016)

Seiring dengan terjadinya aksi gerakan protes di negara-negara Timur Tengah, menggiring rakyat Libya untuk melakukan sebuah protes agar adanya perubahan kepemimpinan di negaranya. Banyaknya protes dan aksi dari rakyat Libya serta dukungan dari negara-negara barat untuk keruntuhan rezim Gaddafi, akhirnya membuat rezim tersebut runtuh. Selain dukungan dari berbagai negara barat, organisasi internasional seperti PBB dan NATO pun ikut serta dalam melemahkan kekuatan Gaddafi. (Ghafur, 2016)

Runtuh dan tewasnya Gaddafi membuat lembaran baru dalam dinamika

perpolitikan Libya. Proses transisi politik di Libya terasa cepat karena adanya National Transition Council dan dukungan dari PBB sehingga proses transisi lebih cepat dari dugaan sebelumnya. Adanya pelaksanaan pemilu dan pembentukan konstitusi baru pada tahun 2012 menjadi bukti bahwa proses transisi ini benar adanya. Pada tanggal 7 Juli 2012 diselenggarakannya pemilu oleh NTC serta menjadi momen dimana NTC menyerahkan kekuasaannya dari NTC menjadi GNC (General People Congress). Dengan terbentuknya GNC sendiri menjadi ajang pertarungan dan perebutan pengaruh bagi para politikus. (Ghafur, 2016)

Selain itu pasca runtuhnya rezim Qaddafi juga membuat politik Islam bangkit di Libya. Dengan agama mayoritas penduduk di Libya adalah muslim membuat proses kebangkitan politik Islam di Libya semakin mudah. Kelompok Islam juga turut penting dalam penurunan rezim Qaddafi. Namun muncul dan bangkitnya kelompok Islam dalam perpolitikan di Libya pasca runtuhnya rezim Qaddafi tentu saja menimbulkan kekhawatiran dari kubu-kubu nasionalis-sekular dan kelompok milisi bersenjata pro Qaddafi yang masih eksis di beberapa daerah. Maka dari itu dengan runtuhnya rezim Qaddafi juga menimbulkan banyak pertarungan konflik serta aksi saling serang dalam merebutkan kekuasaan. Dimana GNC yang didominasi oleh kubu Islam dengan militer dan milisi bersenjata diberbagai wilayah terjadi konflik untuk menerbutkan kekuasaan. Perseteruan antar dua kubu ini membuat terjadinya konflik berkepanjangan

di Libya, dan membuat perang sipil antar etnis semakin memperburuk keadaan di Libya. (Ghafur, 2016)

## **2) Kemampuan Ekonommi**

Kemampuan ekonomi suatu negara merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam membentuk politik luar negeri suatu negara. Keadaan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh dalam melakukan sebuah tindakan. Begitu pula dengan negara-negara korban dari kebijakan Muslim Travel Ban. Tentu saja keadaan ekonomi dinegara mereka ikut andil dalam pembentukan suatu politik luar negeri di negara mereka. Dimana dibawah ini akan menjelaskan bagaimana keadaan ekonomi berbagai negara korban sebagai berikut.

### **2.1 Iran**

Yang pertama adalah Iran, Iran merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Sumber daya alam tersebut diantaranya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, kromium, tembaga, biji besi, timah, seng dan belerang. Dengan kepemilikan sumber daya alam yang melimpah, tidak heran apabila Iran menjadi salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang menjadi incaran negara-negara Barat. (Phoenna, 2016)

Sumber daya alam terbesar yang dimiliki Iran adalah di bidang minyak dan gas buminya. Hal tersebut dibuktikan dengan industri minyak yang dimiliki oleh Iran merupakan komoditi ekspor yang mampu menopang ekonomi domestik Iran selama ini. Selama berpuluh-puluh tahun Iran menjadi negara pengekspor minyak ke negara-negara importir minyak di dunia seperti, Korea

Selatan, Cina, India, Jepang dan sejumlah negara-negara di Eropa. (Phoenna, 2016)

Lalu dibidang industri, Iran merupakan negara yang sangat produktif dimana Iran mampu menghasilkan produk yang cukup banyak untuk diekspor ke luar negeri. Produk industri yang dihasilkan diantaranya, makanan, industri baja, farmasi, otomoti, petrokimia, asuransi hingga industri dibidang militer. Produk otomotif dan petrokimia merupakan produk unggulan yang dihasilkan oleh Iran. (Phoenna, 2016)

Dengan kepemilikan sumber daya alam yang melimpah, pemerintahan Iran selalu menekankan kemandirian untuk negaranya di bidang ekonomi. Pemerintah selalu berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu bergantung terhadap perdagangan bebas. Iran berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri.

Namun, pada era Ahmadinjad Iran sempat mengalami penurunan dibidang ekonomi. Hal tersebut terjadi akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Iran. Sanksi ekonomi tersebut diberikan terhadap Iran karena berita atas pengembangan nuklir di negaranya. Dengan sanksi ekonomi tersebut membuat ekspor minyak dan produksi dibidang otomotif dan petrokimia menurun. Dan sejumlah relasi negara yang bekerjasama dengan Iran di bidang otomotif seperti negara-negara di Eropa, mereka memilih untuk mundur dari kerjasama yang telah dijalin antar kedua tersebut. (Phoenna, 2016)

Ketika terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden Iran selanjutnya, semua keadaan buruk di Iran berubah. Sejumlah harapan muncul pasca terpilihnya Rouhani

sebagai presiden Iran. Rouhani berhasil menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat dan dunia internasional. Ia berhasil meyakinkan banyak negara atas kepemilikan nuklir di negaranya. Dengan usaha yang dilakukan oleh Rouhani waktu itu, membuat sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Iran menjadi di cabut. Pencabutan sanksi ekonomi tersebut membuat Iran bangkit kembali dari keterpurukannya. (Phoenna, 2016)

## **2.2 Irak**

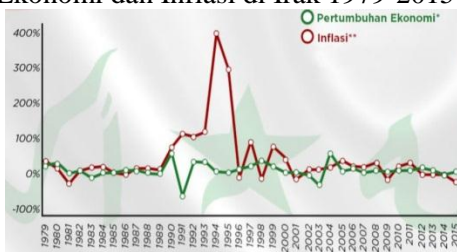
Yang kedua adalah Irak, Irak merupakan negara yang berkembang secara pesat pada tahun 1980-an dibidang ekonomi. Namun beberapa dekade berikutnya setelah beberapa kejadian perang yang menimpa Irak, Irak akhirnya mendapatkan sanksi langsung oleh PBB. Sanksi yang dijatuhkan oleh PBB pada masa periode Saddam Hussein. Saddam Hussein merupakan sosok yang banyak tidak disukai oleh para politikus, namun perekonomian Irak pada awal masa kepemimpinannya sempat membaik. Berdasarkan data dari Bank Dunia, pada tahun 1980 Gross Domestic Product (GDP) Irak menembus angka \$53,406 miliar, angka tersebut naik dua digit dari tahun sebelumnya. (Nathaniel, 2017)

Lalu pasca perang terus menerus dilakukan oleh Irak, membuat perekonomian dinegara tersebut menjadi hancur. Yang menjadi puncak kehancuran perekonomian Irak adalah pasca Perang Teluk II. Dimana kehancuran perekonomian Irak didapati dari embargo yang dijatuhkan oleh PBB untuk Irak. Embargo tersebut membuat ekonomi Irak

tak karuan, inflasi Irak membengkak mencapai angka 396,4%. (Nathaniel, 2017)

Setelah masa penggulingan Saddam Hussein, perekonomian dinegara Irak tahun demi tahun makin membaik. Segelontoran bantuan diberikan oleh Amerika untuk membangun negara Irak kembali. Dana yang diberikan oleh Amerika sejumlah \$60 miliar dan \$2,4 miliar untuk perbaikan dibidang pengairan, listrik, dan sektor lainnya. (Nathaniel, 2017) Perbaikan disektor perekonomian Irak dari tahun ke tahun akan ditunjukan dalam grafik dibawah ini

Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Irak 1979-2015



Dari grafik diatas dapat dilihat apabila pada periode Jalal Talabani (2005-2014) dan Fuad Masum (2014-sekarang) tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Irak mengalami kestabilan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Irak pada masa kepemimpinan mereka berdua tidak mengalami kenaikan yang signifikan, namun setidaknya mereka lebih mampu menstabilkan tingkat inflasi di Irak dibandingkan pada masa kepemimpinan Saddam Hussein. (Nathaniel, 2017)

## 2.3 Suriah



Lalu yang ketiga adalah Suriah, Suriah merupakan negara yang cukup lambat dalam pertumbuhan ekonominya. Suriah juga bukan merupakan negara yang memiliki minyak dengan jumlah banyak seperti negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. (Rosyada, 2017) Produksi minyak per hari pada tahun 2010 hanya 385.000 barel, angka ini sangat jauh dari jumlah pada tahun 1996. (Muhammad M. , 2016) Dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh Suriah, membuat Suriah tidak dapat bergantung dengan sumber daya alamnya dalam memenuhi kebutuhan warganya.

Selain itu Suriah juga merupakan negara yang memiliki masalah dalam sumber daya manusianya, jumlah SDA di Suriah sendiri tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan SDMnya dari tahun ke tahun. (Muhammad M. , 2016) Selain itu permasalahan yang dialami Suriah atas sumber daya manusianya merupakan dampak dari adanya perang sipil yang berkelanjutan, sehingga menghambat proses pembelajaran penduduk Suriah dan menghambat mereka semua dalam berkreasi dan berinovasi. Dengan terbatasnya ketrampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Suriah membuat perkembangan industri di Suriah juga turut terhambat. (Rosyada, 2017)

Berdasarkan data dari *cultureGrams* pada tahun 2015 Suriah mengalami kemerosotan dibidang ekonominya. Dimana hal ini terjadi karena perang sipil yang berkelanjutan di Suriah. Didapati jumlah GDP (PPP) in billions sekitar \$107.6 dan GDP (PPP) percapita sekitar 5.100. (Rosyada, 2017)

Dengan adanya perang yang terus menerus terjadi di Suriah membuat beberapa negara yang melakukan kerjasama dengan Suriah memutuskan kerjasama tersebut. Diantaranya adalah negara-negara Uni Eropa, dimana Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Suriah dengan tidak lagi mengimpor minyak dari Suriah. Sanksi yang diberikan Uni Eropa membuat Suriah terseulitkan, dimana ekspor minyak merupakan sumber pemasukan untuk Suriah. Uni Eropa merupakan salah satu negara pengimpor minyak terbesar di Suriah, yaitu dengan jumlah 95%. (Rosyada, 2017)

#### **2.4 Sudan**

Yang keempat adalah Sudan, Sudan merupakan negara yang cukup berpotensi dalam bidang sumber daya alam. Walaupun memiliki potensi di bidang sumber daya alam, namun Sudan termasuk dalam negara miskin. Perekonomian di Sudan sendiri bergantung pada sektor pertanian dan minyak. Namun Sudan memiliki kendala pada infrastruktur yang tidak memadai dan ditambah dengan perang saudara yang terus terjadi di Sudan. (fanack.com, 2016)

Pada tahun 1999 Sudan berhasil mengekspor minyak mentahnya. Hampir satu dekade perekonomian Sudan mengalami perkembangan, hal tersebut akibat dari produksi minyak yang terus menaik. Namun pada tahun 2011 keadaan berubah di iringi dengan pemisahan Sudan Selatan. Pemisahan Sudan Selatan dari Sudan membuat perekonomian Sudan hancur. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Sudan untuk mengupayakan keseimbangan perekonomian

dinegaranya, namun semua terasa sia-sia. (fanack.com, 2016)

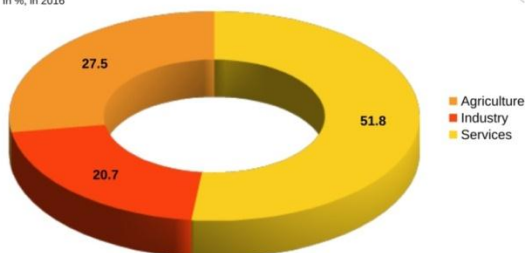
Selain itu sanksi komprehensif yang dijatuhkan oleh AS terhadap Sudan dengan alasan politik lebih berdampak pada perekonomian Sudan. Sudan sendiri berusaha mengembangkan sumber pendapatannya di bidang non minyak, seperti tambang emas dan melakukan program penghematan sebisa mungkin guna untuk mengurangi pengeluaran negara. (fanack.com, 2016)

Bank Dunia mengatakan apabila Sudan harus menekankan perekonomiannya di bidang pertanian dan peternakan. Penekanan di bidang pertanian dan peternakan berguna untuk diversifikasi ekonomi dan kestabilan ekonomi makro dalam jangka menengah. Menurut Bank Dunia yang menjadi hambatan Sudan dalam mencapai kestabilan ekonominya adalah karena adanya konflik yang terus terjadi, lalu terlalu bergantungnya Sudan terhadap minyak, pengabaian dibidang pertanian, peternakan, sumber energi alternatif, distribusi sumber daya keuangan yang tidak adil, minimnya akses infrastruktur ke sumber daya alam, kegagalan pemerintahan, rendahnya kredibilitas kebijakan publik dan insentif yang tidak memadai untuk investor swasta. (fanack.com, 2016)

Gambar 4.2 Grafik PDB Sudan

## PDB

GDP per economic sector  
In %, in 2016



Source: World Bank

Pada grafik diatas dapat dilihat apabila Produk Nasional Bruto (GNP) Sudan pada tahun 2014 berada di 475.827,7 Juta. Dimana angka tersebut didapati dari sektor pertanian dan peternakan sebesar 28,2%, lalu sektor industri yaitu minyak dan tambang sebesar 24%, sektor jasa sebesar 48%. (fanack.com, 2016)

Lalu Produk Domestik Bruto (PDB) Sudan pada tahun 2015 mencapai \$97,15 miliar, angka ini cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2014 sejumlah \$82,15 miliar dan \$72 miliar pada tahun 2013. PDB diperkirakan akan meningkat 3,5% pada tahun 2017, dibandingkan tahun 2016 yang hanya menembus angka 3,1%. Lalu diperkirakan tingkat Inflasi di Sudan pada tahun 2017 mencapai 16,1% angka ini cukup besar dibandingkan tahun 2016 yang hanya berada di 13,5%. (fanack.com, 2016)

## 2.5 Somalia

Kelima adalah Somalia, Somalia merupakan negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertaniannya. Dimana

sektor pertanian menyumbang sebesar 60,2% dari total keseluruhan Pendapatan Domestik Brutonya. Sekitar 71% penduduknya bekerja di sektor pertanian atau agrikultur. Komoditas agrikultur yang penting bagi Somalia diantaranya, pisang, sorgum, jagung, kelapa, beras, tebu, mangga, biji wijen, kacang-kacangan. Dan dibidang peternakan ada sapi, kambing, dan ikan. (ilmupengetahuanumum.com)

Namun setelah tahun 1970-an keadaan perekonomian Somalia berubah. Somalia mulai mengalami kesulitan dibidang perekonomian. Hal tersebut terjadi karena kemarau panjang yang menimpa Somalia hingga saat ini. Selain itu kesulitan ekonomi juga dikarenakan keberadaan pengungsi dari Ethiopia. Dengan keadaan perekonomian Somalia yang bergantung pada bidang pertanian, tentu saja buruknya cuaca yang menimpa Somalia berdampak pada perekonomian negeranya. (ilmupengetahuanumum.com)

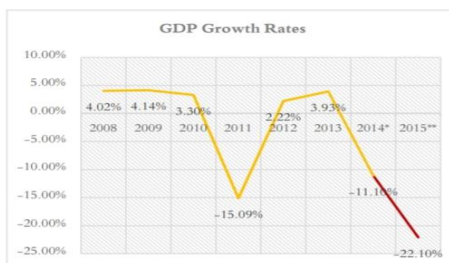
Keadaan yang memburuk mulai dari tanah yang tandus, curah hujan yang sedikit, sumber daya alam yang terbatas dan cara-cara berproduksi yang tradisional membuat perekonomian di Somalia tidak dapat berkembang. Sejak cuaca buruk yang menimpa Somalia krisis kelaparanpun melanda Somalia. Hingga saat ini kelaparan masih menjadi persoalan yang serius di Somalia. Pada tahun 2011 didapati data sejumlah 260 ribu penduduk di Somalia tewas karena kelaparan. Menurut PBB, sebagian besar korban dari kelaparan adalah para balita. (African Union, 2017)

Dengan krisis kelaparan yang melanda Somalia membuat Somalia bergantung pada bantuan-bantuan dari negara lain. Krisis kelaparan yang terjadi di Somalia semakin diperburuk dengan ditambahkan konflik bersenjata yang terjadi di Somalia. (African Union, 2017)

## 2.6 Yaman

Lalu Yaman, Yaman negara yang mengalami konflik berkepanjangan. Menurut Bank Sentral Yaman, Groos National Product Yaman mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari data pada tahun 2011 kegiatan ekonomi Yaman mengalami penurunan sebesar 22%. Hal ini terjadi akibat adanya blokade di wilayah darat dan laut, yang berakibatkan pada terhambatnya kegiatan ekonomi di Yaman. Pada tahun 2015 Yaman mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai angka -21%. Dengan penurunan kegiatan ekonomi yang sangat drastis tentu saja membuat perekonomian di Yaman melemah. (Firdaus, 2017)

Gambar 4.3 Grafik GDP Yaman 2008-2015



(The Small and Micro Enterprise Development Unit (SMED), 2015)

Dari grafik diatas dapat diartikan apabila keadaan ekonomi Yaman sangat-sangat terpuruk. Yaman tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Konflik berkepanjangan yang melanda Yaman membuat keadaan dinegaranya tidak karuan. Didapati data dari Kementrian Perdagangan dimana menyatakan apabila ditahun 2015 Yaman harus mengimpor 90% kebutuhan penduduknya dari luar, terutama dibidang pangan. Hal tersebut terjadi akibat konflik yang berkepanjangan di negaranya, sehingga Yaman tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri.

Tabel 4.1 Data Gross Domestic Bruto  
Yaman 2009-2015

	20 09	20 10	20 11	20 12	20 13	20 14	20 15
GDP harga berlak u	5, 77 3	6, 78 7	6, 64 5	6, 87 5	7, 70 1	7, 21 8	6,7 06
Tingk at Pertu mbuh an GDP	5 %	18 %	- 2 %	3 %	12 %	- 6 %	- 7%
Harga GDP Tetap	2, 66 8	2, 75 6	2, 34 0	2, 39 2	2, 48 6	2, 21 0	1,7 22
Pertu mbuh an GDP	4. 14 %	3. 30 %	- 15 %	2. 22 %	3. 93 %	- 11 %	- 22. 10 %

(The Small and Micro Enterprise Development Unit (SMED), 2015)

Dari data pada tabel diatas, dapat dilihat apabila terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Terlihat jelas apabila pada tahun 2014-2015 penurunan drastis terjadi menimpa Yaman. Angka penurunan sampai pada angka minus. Keadaan ekonomi Yaman yang telah hancur akibat dari adanya konflik yang berkepanjangan. Kemiskinan yang menimpa penduduk Yaman akibat adanya perang saudara serta minimnya pendidikan yang diterima oleh anak-anak akibat dari adanya konflik yang terus menerus karena para anak-anak harus menyelamatkan dirinya dari konflik tersebut. (Firdaus, 2017)

Selain itu, keadaan ekonomi yang hancur akibat dari adanya penurunan harga minyak di Yaman. Dimana diketahui apabila minyak merupakan sumber pendapatan utama Yaman. Dengan itu tidak heran apabila Yaman mengalami kesulitan perekonomian. (Firdaus, 2017)

## **2.7 Libya**

Dan yang terakhir adalah Libya, Libya merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang menjanjikan terutama pada minyaknya. Sebelum tahun 2011, Libya sempat menjadi negara pemasok minyak utama di dunia. Minyak juga menjadi sumber utama pendapatan negara Libya. (Firmansyah, 2015)

Namun setelah tahun 2011 semua keadaan berubah, libya mengalami revolusi. Peristiwa besar melanda negara tersebut dan membuat kehancuran menimpa negaranya.



Peristiwa tersebut diantaranya terjadi perang saudara, intervensi asing, dan penggulingan rezim Gaddafi. Dengan peristiwa yang menimpa Libya, Libya harus membayar semua peristiwa tersebut. (Firmansyah, 2015)

Peristiwa pada tahun 2011 menyebabkan kehancuran hampir diseluruh rumah dan bisnis penduduk Libya. Dengan itu atusan ribu penduduk Libya memilih untuk mengungsi, karena mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Semua pengungsi menggantungkan hidupnya pada bantuan dari badan amal yang terdapat di kamp-kamp darurat. (Firmansyah, 2015)

Seluruh proyek infrastruktur pun terhenti, walaupun telah berada di tahap akhir. Para investor asing yang berada di Libya sebelum tahun 2011 pun berbondong-bondong meninggalkan Libya pada tahun 2011. Para investorpun tidak memiliki niatan untuk kembali ke Libya dalam waktu dekat. (Firmansyah, 2015)

Minyak yang menjadi sumber utama negara tersebut pun sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dalam data laporan bulanan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada bulan Februari 2015 menyatakan apabila, Libya saat ini hanya mampu memproduksi 343 ribu barel per harinya. Padahal sebelum tahun 2011 Libya mampu memproduksi minyak sebesar 1,2 juta barel per hari. (Firmansyah, 2015)

### **3) Kemampuan Militer**

Kemampuan militer dan pertahanan merupakan sebuah kunci utama bagi suatu negara dalam memainkan peran di bidang keamanan. Dimana

kemampuan militer juga menjadi alat suatu negara dalam melindungi negaranya dari serangan atau ancaman musuh. Kemampuan militer negara menjadi sebuah pertimbangan negara lain sebelum menyerang suatu negara. Selain itu kemampuan militer sebuah negara merupakan cerminan dari kekuatan negara tersebut. Begitu pula dengan berbagai negara korban dari kebijakan Muslim Travel Ban. Mereka memiliki kemampuan militer masing-masing, dan kemampuan militer yang mereka miliki juga menjadi pertimbangan ketika mereka mengeluarkan politik luar negeri mereka sebagai respon untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Kemampuan militer masing-masing negara korban akan dijelaskan sebagai berikut.

### **3.1 Iran**

Yang pertama adalah Iran, Iran merupakan negara yang tidak dapat dianggap remeh dalam bidang militernya. Iran memiliki peralatan militer serta pasukan militer yang sangat menunjang keamanan dan pertahanan negaranya. (Phoenna, 2016) Iran terkenal dengan peralatan militer yang ditakuti oleh banyak negara. Peralatan militer tersebut diantaranya, rudal balistik sejil, kapal selam ghadir, rudal antikapal perang khali, gerilyawan hezbollah, dan rudal S-300. (Tribunnews.com, 2018)

Pada masa kepemimpinan Ahmadinejad Iran berhasil mengembangkan berbagai rudal yang canggih. Keberhasilan Iran dalam membuat rudal yang canggih tentu saja juga hasil dari kerjasamanya dengan negara-negara yang memiliki kekuatan seperti Rusia, Cina dan Korea Utara. (Phoenna, 2016)

Walaupun pada masa kepemimpinan Ahmadinejad Iran terkena sanksi ekonomi yang menghambat segala kemajuan Iran

termasuk juga menghambat Iran bekerjasama dengan negara-negara lain di bidang militer. Namun setelah terpilihnya Rouhani, Iran memiliki harapan baru. Dimana Iran mampu melakukan kerjasama lagi dengan negara-negara yang memiliki kekuatan di bidang militer. (Phoenna, 2016)

### **3.2 Irak**

Lalu Irak, pada tahun 1990-an kekuatan militer Irak pernah berada di jajaran 4 terbaik di dunia. (Satriawan, 2018) Mulai dari tahun 1970-an pemerintah Irak telah memfokuskan Irak terhadap pengembangan dan pembuatan senjata kimia dan biologinya. Pengembangan dan pembuatan senjata yang dilakukan oleh Irak untuk memperkuat kekuatan militer negaranya. Pada tahun 1980-an Irak telah mengembangkan kekuatan militernya dengan pesat. Bahkan pemerintah Irak pun mengeluarkan banyak dana, sumber daya manusia, teknisi serta ilmu pengetahuan guna untuk mengembangkan infrastruktur dalam kekuatan militernya. (Ardiansyah, 2011)

Pada tahun 1990 Irak juga berhasil memproduksi gas ganda berjeniskan VX, dimana gas ini dikenal sebagai penghancur yang paling efektif dan kuat. Gas ini juga diketahui mampu menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Dibidang biologi sendiri negara ini memfokuskan untuk melakukan beberapa riset dan memproduksi batolinium, aflatoksin dan juga anthrax. Puncak kemerdekaan Irak dibidang militernya adalah ketika awal terjadinya Perang Teluk I dan Perang Teluk II. Dimana pada awal perang tersebut Irak memiliki alat persenjataan yang

lengkap guna untuk menyerang para musuhnya. (Ardiansyah, 2011)

Namun keadaan berbeda ketika Irak dipimpin oleh Saddam Hussein ketika memasuki tahun 2000-an, dimana Irak mengalami invasi dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menuding apabila Irak memiliki pemimpin yang diktaktor. Selain itu beberapa tuduhan selalu diberikan oleh Amerika Serikat dan negara Barat yang lainnya terhadap Irak. Keadaan tersebut membuat Irak dijatuhkan beberapa sanksi yang membuat negara tersebut hancur dan tak sekuat pada tahun 1990-an. (Ardiansyah, 2011)

Masa pemerintahan Saddam Hussein pun runtuh, dimana Amerika Serikat turut serta dalam keruntuhan rezim Saddam Hussein. Pasca invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak sendiri membuat peran Amerika Serikat sangat penting di Irak. Diketahui apabila tentara Amerika dengan jumlah yang banyak berada di Irak, hal ini dikarenakan Amerika ingin memberikan bantuan terhadap Irak dalam memerangi kelompok teroris yang berada di Irak.

### **3.3 Suriah**

Yang ketiga adalah Suriah, Suriah merupakan negara dengan kekuatan militer yang tidak dapat diragukan. Sejak 2011, Suriah selalu mengalami konflik hingga saat ini. Banyak negara yang ikut serta dalam pertahanan negara Suriah. Meskipun banyak serangan baik dari dalam maupun luar namun negara ini masih belum tumbang. Suriah termasuk dalam negara yang kecil, luas

wilayahnya hanya sekitar 180km persegi, walaupun seperti itu namun Suriah memiliki jumlah personel tentara yang cukup banyak. Negara itu memiliki 180 ribu personel tentara. (Dian)

Selain memiliki jumlah personel tentara yang cukup banyak, Suriah juga memiliki keamanan udara yang sangat ketat. Didapati data apabila kekuatan Suriah di udara masuk dalam peringkat 25 di dunia. Negara ini memiliki 461 unit udara yang terdiri dari 165 jet tempur, 168 helikopter dan berbagai kendaraan tempur lainnya. (Dian)

Keamanan Suriah di darat pun tidak diragukan lagi, Suriah menempati peringkat ke-6 dengan jumlah tank terbanyak di dunia. Suriah memiliki kurang lebih 4.500 tank dan 4.500 kendaraan lapis baja dan kendaraan peluncur roket lainnya. Kekuatan Suriah dilaut pun juga dapat dikatakan lumayan. Suriah memiliki 56 kapal laut dan beberapa alat tempur laut lainnya. (Dian)

### **3.4 Sudan**

Lalu keempat adalah Sudan, Sudan merupakan negara yang sedang gencang-gencangnya melakukan perubahan dibidang militernya sejak tahun 2017. Hal tersebut dibuktikan dengan dijalinnya hubungan antara Sudan dengan Rusia di bidang militer. Sudan telah mencapai kata sepakat dengan kementerian pertahanan Rusia untuk membantu Sudan dalam meningkatkan kekuatan angkatan bersenjata Sudan. (JEJAKTAPAK, 2017)

Sudan juga telah melakukan pembelian jet tempur yaitu Su-35 dari Rusia. Sudan

melakukan perubahan dibidang militer dikarenakan, Sudan sudah saatnya memiliki militer yang mampu melindungi negaranya dari negara Barat terutama Amerika. Al-Bashir menyatakan apabila keadaan Sudan cukup mengkhawatirkan dari serangan-serangan musuh. (JEJAKTAPAK, 2017)

### **3.5 Somalia**

Kelima adalah Somalia, Somalia merupakan negara yang sering terjadi konflik diantara negara-negara Afrika yang lainnya. Konfrontasi sering terjadi di negara ini, bahkan melibatkan pemerintah dan pihak oposisi. Inilah yang membuat Somalia melemah. Somalia memiliki jumlah populasi sebesar 12 juta jiwa dan merupakan negara Afrika dengan garis pantai terpanjang. (Rizal)

Somalia memiliki angkatan bersenjata yang terdiri dari 12.000 prajurit aktif dan 24.000 pasukan cadangan. Walaupun dapat dikatakan Somalia memiliki prajurit yang jumlahnya tidak sedikit, namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan konflik internal yang terus melanda Somalia maka militer yang dimiliki Somalia dikatakan lemah. (TRIBUNnews, 2018)

Somalia memiliki 140 tank dan 430 kendaraan lapis baja. Namun sebelum tahun 2012 negara ini awalnya tidak memiliki angkatan udara, hingga akhirnya Italia bersedia membantu Somalia untuk membangun angkatan udara. Sedangkan dibidang angkatan lautnya, Somalia sempat mengalami disintegrasi besar-besaran pada abad 20. Sebelum pada akhirnya tahun 2012 Uni Emirat Arab memberi bantuan sebesar 1

juta dolar AS untuk memperkuat angkatan laut di Somalia. (TRIBUNnews, 2018)

Selain itu pada tahun 2017 Somalia pun juga mendapatkan bantuan dari Turki yaitu dengan pemberian pelatihan terhadap tentara Somalia. Dimana Turki membuka pangkalan militer terbesarnya di ibu kota Somalia. Dimana pangkalan ini digunakan untuk memberikan pelatihan terhadap tentara Somalia. Lebih dari 10.000 tentara Somalia akan dilatih oleh perwira Turki yang berada di markas tersebut. (Berlianto, 2017)

### **3.6 Yaman**

Lalu Yaman, Yaman merupakan negara yang sering membelanjakan uang negaranya untuk belanja alat pertahanan. Anggaran pertahanan di Yaman sendiri meningkat dari tahun ke tahun. Didapati data pada tahun 2001 terdapat anggaran sebesar US \$540 juta sedangkan pada tahun 2006 angka tersebut menaik hingga US \$2 miliar sampai dengan \$2,1 miliar. (Firdaus, 2017)

Pada tahun 2015 didapati data jumlah militer Yaman mencapai 175.000 personel. Jumlah tersebut mencakup angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara serta pasukan yang lain. Walaupun Yaman sering mengeluarkan dana untuk membeli alat pertahanan, namun Yaman merupakan negara dengan kelas menengah kebawah dalam jumlah personel militernya. Dengan keterbatasan jumlah militernya tentu saja berpengaruh pada kestabilan negara Yaman. Selain itu keterbatasan jumlah militer Yaman juga menjadi pertimbangan setiap pemimpin

Yaman dalam membuat sebuah kebijakan luar negerinya. (Firdaus, 2017)

Selain itu pangkalan militer Yaman juga kerap diserang oleh Al Houthi. Dengan penyerangan pangkalan militer yang terus menerus terjadi di Yaman, membuat pemerintah Yaman meminta bantuan Arab Saudi untuk melindungi pangkalan militernya. (Firdaus, 2017)

### **3.7 Libya**

Yang terakhir adalah Libya, Libya merupakan negara yang keadaan militernya tidak dapat dikatakan bagus. Negara ini memiliki angkatan udara, angkatan darat dan juga angkatan laut, namun sayangnya Libya tidak memiliki perlengkapan senjata yang memadai. Dimana Libya sendiri tidak memiliki peralatan persenjataan yang memumpuni dan lengkap. Sehingga membuat negara ini juga akan lebih kesusahaan dalam mengamankan negara mereka. (SINDONEWS, 2012)

Dengan keadaan militer yang tidak memumpuni, maka Libya menjadi negara yang sering di kacaukan oleh beberapa kelompok terorisme. Dimana kelompok terorisme yang masuk ke negara Libya sendiri guna untuk menciptakan instabilitas di negara Libya. (Parstoday, 2018)

## **4) Lingkungan Internasional**

Lingkungan internasional merupakan suatu hal yang cukup penting untuk suatu negara membuat sebuah



kebijakan luar negeri. Dengan adanya keadaan lingkungan internasional suatu negara mendapatkan dukungan dalam sebuah kebijakan yang mereka keluarkan.

Begitupula dengan berbagai negara korban, keadaan lingkungan internasional negara mereka sangat penting ketika negara mereka membentuk sebuah kebijakan guna merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Berbagai negara korban dari kebijakan Muslim Travel Ban memiliki dukungan dari banyak negara maju di dunia. Negara-negara tersebut seperti, Inggris, Perancis, Jerman, Indonesia. (KOMPAS.com, 2017)

Dimana negara-negara yang memberi dukungan dan siap menerima pengungsi dari ketujuh negara korban tersebut sangat menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Mereka mengatakan apabila keputusan yang dikeluarkan oleh Trump sangat tidak berperikemanusiaan. (KOMPAS.com, 2017)

Selain beberapa negara maju yang memberi dukungan terhadap ketujuh negara tersebut, beberapa organisasi internasional juga mengupayakan agar warga dari ketujuh negara tersebut mendapatkan hak mereka yang semestinya. Organisasi internasional tersebut diantaranya, Amnesty Internasional, ACLU, CAIR dan yang lainnya. Dan juga FBI sedang melakukan beberapa penyelidikan terkait terrorisme yang ada di Amerika Serikat, dan menyelidiki apakah alasan Trump mengenai pelarangan masuk dari tujuh negara tersebut benar terbukti. (Saju, 2017)

## **B. Respon Berbagai Negara Korban Terhadap Kebijakan Muslim Travel Ban**

Politik luar negeri dapat dikatakan sebagai sebuah respon yang dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk pertahanan dan dibentuk untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Politik luar negeri juga dapat dikatakan sebagai refleksi dari arah kebijakan dan perilaku politik suatu negara terhadap negara lain.

Respon yang dikeluarkan atau yang dibentuk suatu negara dalam politik luar negeri negaranya bisa dalam bentuk aksi, reaksi militer, sikap diplomatik tertentu, ide atau gagasan, doktrin/ideologi, tindakan-tindakan persuasif dan kooperatif, strategi non block, dan sebagainya yang berhubungan dengan nasional yang berorientasinya ke luar negeri.

Selain itu politik luar negeri dibentuk dengan beberapa faktor pertimbangan diantaranya faktor kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi, kondisi militer serta keadaan lingkungan internasionalnya. Dengan mempertimbangan beberapa faktor tersebut dalam membuat politik luar negeri, ketujuh negara korban dari Kebijakan Muslim Travel Ban mengeluarkan respon yang beragam. Dimana ada yang merespon dengan membalas sikap Donald Trump tersebut dengan membuat kebijakan yang sama seperti Muslim Travel Ban, diantaranya yaitu Iran dan Irak. Ada juga yang hanya merespon kebijakan Muslim Travel Ban hanya dengan kecaman dan menyayangkan atas sikap Trump. Respon tersebut merupakan respon dari 5 negara lainnya seperti Suriah, Libya, Sudan, Yaman dan Somalia Dengan ini penulis akan menjelaskan respon dari 7 negara korban menjadi dua kelompok yang akan dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Negara Dengan Respon Membalas**

Kebijakan Muslim Travel Ban sangat mendapatkan respon keras dari Iran dan Irak. Dimana

kedua negara ini memilih untuk membalas kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump pada awal masa kepemimpinannya.

Yang pertama adalah negara Iran, dimana Iran mengeluarkan pernyataan yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negrinya yang berada di Taheran dimana Iran sangat mengecam aksi yang dilakukan oleh Donald Trump. Javad zarif yang merupakan Menteri Luar Negeri Iran, menyatakan apabila aksi Trump tersebut merupakan sebuah bentuk “penghinaan dan pelecehan” bagi Islam terutama bagi Iran.

Selain itu Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Iran yaitu Bahram Qassemi yang dikutip oleh Islamic Republic News Agency (IRNA) Qassemi menyatakan sebagai berikut:

*“Republik Islam Iran, setelah dengan seksama meneliti keputusan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Amerika, kami akan mengambil tindakan sebanding dan timbal balik”.* (Antara/Reuters, 2017)

Selain itu setelah melihat dari siapa saja yang dilarang dalam kebijakan tersebut, Qhassemi kembali mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

*“Adalah hal yang disayangkan bahwa pemerintah Amerika, karena kebutaan mereka dalam hal ekonomi dan perdangan, telah menutup mata mereka terhadap pelaku utama terorisme di Amerika,”* ucapnya. (Kusumo, 2017)

Dimana Qhassemi mengatakan apabila Amerika salah menargetkan sasarannya. Negara-negara yang tercantum didalam kebijakan tersebut merupakan negara-negara yang seharusnya tidak dicurigai. Pada nyatanya ketujuh negara tersebut tidak memiliki rekam jejak sebagai teroris di Amerika Serikat. (Kusumo, 2017)

Dengan itu Iran menyatakan apabila perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Trump merupakan penghinaan yang mecolok terhadap Dunia Muslim, terutama Iran. (Erickson, 2017) Selain itu menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif melalui Twitter juga menyatakan apabila kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump adalah “hadiah besar” untuk para ekstremis. (Kristanti, 2017) Larangan yang dikeluarkan Donald Trump merupakan penghinaan untuk Dunia Muslim.

Kecaman-kecaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Iran melalui para menterinya ternyata tidak hanya sekedar kecaman. Pada bulan Februari Iran memutuskan untuk membalas kebijakan yang dikeluarkan Trump dengan menolak permohonan visa sejumlah atlet AS yang akan bertarung dalam turnamen gulat internasional di Iran. Visa para atlet AS yang ditolak oleh Iran akan mengikuti turnamen internasional di Iran Barat pada tanggal 16-17 Februari 2017. (TribunJateng.com, 2017) Pada Tanggal 3 Februari 2017 dikutip dari CNN Indonesia, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yaitu Bahram Qhassemi mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

*“Setelah meninjau kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat, tim khusus bersama dengan Kementerian luar negeri akhirnya menolak visa bagi tim gulat Amerika Serikat”* (Suastha, 2017)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump membuat pemerintah Iran tidak mempunyai pilihan lain selain melarang pegulat Amerika Serikat untuk ikut bertanding dalam turnamen yang diadakan di Teheran, Iran. Keputusan pertama yang dilakukan oleh pemerintah Iran menjadi tindakan pertama yang diambil oleh Iran sebagai balasan terhadap kebijakan Muslim Travel Ban. (TEMPO.CO, 2017)

Dengan adanya penahanan permohonan visa bagi atlet dari Amerika Serikat tentu saja sangat merugikan

Amerika Serikat di bidang Olahraga. Karena pada dasarnya gulat sangat populer di Iran dan Amerika Serikat. Sejak tahun 1998, Amerika Serikat selalu mengikuti kompetisi gulat. (TEMPO.CO, 2017) Pada tahun 2009 Amerika Serikat mulai mengikuti pertandingan gulat di Iran dan sampai saat ini sudah memenangkan 15 medali. (Tempo.co, 2009)

Selain bentuk balasan timbal balik yang dilakukan oleh pemerintahan Iran, masyarakat juga melakukan beberapa aksi melalui halaman internet dalam bentuk protesnya kepada Trump. Dimana mereka menyerukan apabila tindakan yang dilakukan oleh Trump sangat tidak adil bagi rakyat muslim. Kebijakan yang dikeluarkan Trump sangat merugikan banyak pihak terutama bagi rakyat Iran yang berada di Amerika Serikat. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump tentu saja membuat warga Iran yang berada di Amerika Serikat harus melakukan prosedur imigrasi ulang guna untuk mengikuti kebijakan yang telah diberlakukan oleh Trump. (Zimmt, 2017)

Yang kedua adalah Irak, lima warga negara Irak didapati menjadi daftar penduduk yang dilarang untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Dimana lima warga tersebut dilarang menaiki pesawat dari Kairo yang akan menuju ke New York. Walaupun mereka telah memiliki visa AS, namun mereka tetap dilarang melakukan penerbangan ke Amerika Serikat. Sejumlah warga Irak tersebut dihadang dan kemudian dinaikan ke pesawat yang menerbangkan mereka kembali ke negara masing-masing. (Putsanra, 2017)

Dengan hal tersebut Irak sangat terhina atas tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Tindakan yang dilakukan oleh Trump membuat Irak mengambil keputusan untuk membalas kebijakan Muslim Travel Ban seperti Iran. Menurut Irak kebijakan Muslim Travel Ban sangat melecehkan

negaranya. Dengan itu mau tidak mau Irak harus membalas kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump pada awal masa kepemimpinannya. Dikutip dari The Washington Post pada 28 Januari 2017, Renas Jano yang merupakan Anggota komite urusan Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

*“after the U.S. President’s decision to stop granting visas for Iraqi citizens, it is very likely thatt Iraq will stop granting U.S. citizens entry visas”* (Erickson, 2017)

Ia juga mengatakan bila Irak membalas perbuatan Trump atas kebijakan yang dikeluarkan tentu saja akan berdampak pada tentara Amerika Serikat yang berada di Irak untuk memerangi ISIS. Selain itu Amerika Serikat juga akan sangat dirugikan, karena terdapat banyak perusahaan yang melakukan bisnis di Irak seperti contohnya perusahaan ExxonMobil, Shell dan perusahaan dibidang lainnya. (Erickson, 2017)

Didapati data bahwa terdapat ribuan jumlah tentara Amerika Serikat di Irak. Tentara tersebut dikirim oleh Ameika Serikat untuk memerangi kelompok ISIS yang berada di Irak. Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pentagon mengatakan apabila terdapat 5.262 personil tentara Amerika Serikat di Irak. Namun informasi dari militer Amerika Serikat bahwa jumlah pasukan di Irak terdapat 9.000 tentara. (Perdana, 2017)

Keberadaan tentara Amerika Serikat yang cukup banyak di Irak tentu saja berada di posisi tidak aman setelah keluarnya kebijakan kontrofersi Trump. Keberadaan tentara Amerika Serikat bisa menjadi sasaran bagi kelompok milisi akibat dari pernyataan-pernyataan Trump yang dikeluarkan selama masa kepemimpinannya yang melibatkan negara mayoritas muslim seperti Irak. (Perdana, 2017)

Keputusan timbal balik yang dikeluarkan Irak sebagai respon dari adanya kebijakan Muslim Travel

Ban juga akan mengakibatkan kerusakan banyak orang. Tidak hanya dari segi pasukan Amerika yang sedang berada di Irak dan pengusaha yang berbisnis di Irak, tapi tindakan timbal balik yang dilakukan Irak untuk Amerika Serikat pastinya juga akan berdampak pada kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di Irak.

## **2. Negara Dengan Respon Menyangkan**

Pada bagian ini memiliki respon yang berbeda dari penjelasan diatas. Dimana Sudan memilih untuk tidak membalas tindakan dari perintah eksekutif Trump pada awal masa kepemimpinannya.

Sudan, dikutip dari Washington Post pada tanggal 28 Januari 2017 Sudan sangat menyangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Karena melihat rekam jejak hubungan antara Sudan dengan Amerika Serikat yang baru sedang berusaha menjalin hubungan baik kembali pada masa kepemimpinan Obama. Dimana pada masa kepemimpinan Obama, Obama setuju untuk mencabut embargo perdagangan 20 tahun yang diberikan untuuk Sudan. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump tentu saja membuat ketegangan kembali diantara kedua negara ini. (Erickson, 2017)

## **3. Negara Dengan Tidak Mengeluarkan Respon**

Pada penjelasan dibawah ini, akan menjelaskan respon dari ke empat negara korban yang lain seperti Suriah, Somalia, Yaman, Libya yang memilih untuk tidak terlalu merespon kebijakan Muslim Travel Ban yang dikeluarkan oleh Trump.

Yaman, Suriah Libya dan Somalia sampai saat ini belum mengeluarkan pernyataan apapun mengenai kebijakan Muslim Travel Ban yang melibatkan negara mereka. Belum adanya pernyataan yang dirilis dari

negara mereka dikarenakan keadaan negara mereka yang sedang tidak memungkinkan untuk merespon kebijakan tersebut.

Seperti negara Suriah, Suriah masih didera dengan krisis kemanusiaan, yang terancam mencapai level puncak. Maka tidak heran apabila pemerintah Suriah hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan apapun atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. (Kristanti, 2017) Walaupun pemerintah Suriah belum secara resmi mengeluarkan pernyataan tentang Muslim Travel Ban, justru respon dari masyarakat Suriah pun berdatangan sebagai unjuk suara dari adanya kebijakan tersebut.

Dimana warga Suriah sangat menyayangkan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Warga Suriah beranggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan yang sangat melawan kemanusiaan dan deskriminasi. (VOANews, 2018)

Yaman, pemerintah Yaman juga belum mengeluarkan pernyataan apapun atas kebijakan Muslim Travel Ban. Namun, kedutaan Yaman di Washington telah mengunggah sebuah peringatan di Facebook untuk masyarakat Yaman yang akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, serta memberi peringatan agar mereka tidak melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sampai keadaan memungkinkan. (Kristanti, 2017)

Sedangkan Libya sama dengan Yaman dan Suriah, dimana negara ini juga belum mengeluarkan pernyataan sebagai respon atas tindakan Trump yang melibatkan negara mereka. Karena seperti informasi yang dilansir dari Liputan6 bahwa Libya sekarang sedang mengalami kehancuran akibat dari perang saudara yang menimpa negaranya. (Kristanti, 2017)

Somalia, sampai saat ini belum ada pernyataan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintahan Somalia dalam menanggapi kebijakan Muslim Travel Ban.



Respon datang dari warga Somalia yang tinggal di Amerika Serikat dimana banyak mengalami kesulitan untuk bertemu dengan keluarganya yang berada di Somalia, bahkan keberadaannya di Amerika Serikat pun akan terancam. Masyarakat Somalia beranggapan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk kepentingan keamanan nasional namun melainkan untuk kepentingan Trump yang merupakan anti muslim. (Lawson, 2018)